

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SORONG*ANALYSIS PERFORMANCE OF THE LOCAL GOVERNMENT OF SORONG CITY*

Oleh:

Melsiano Yosias Melatunan¹**Sherly Pinatik²**^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail :

¹melsianoy@gmail.com²Sherlypinatik@unsrat.ac.id

Abstrak: Kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Sorong merupakan informasi yang penting dalam membuat kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang positif dan transparan, terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Sorong, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengukur kinerja keuangan dengan rasio efisiensi dan efektifitas. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efisiensi pemerintah daerah Kota Sorong kurang efisien karena nilai rasionya sudah 90% - 99%, sedangkan rasio efektifitas cukup efektif karena nilai yang diperoleh masih dibawah 100%. Agar belanja daerah Kota Sorong bisa lebih efisien, maka pemerintah daerah dalam hal ini, perlu mengkaji antara sektor yang produktif dengan sektor yang kurang produktif, kemudian pemerintah daerah harus memotong anggaran di sektor yang kurang produktif dan mengalihkannya ke sektor yang lebih produktif. Agar belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien, maka hal penting yang harus diketahui oleh manajer publik adalah pemahaman tentang konsep belanja, dengan memahami konsep belanja maka perencanaan dan pengendalian pengeluaran daerah menjadi lebih mudah dilakukan. Agar dalam perencanaan sebisa mungkin merasionalkan belanja sehingga belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien.

Kata Kunci : *analisis kinerja keuangan, kinerja keuangan pemerintah daerah, efisiensi dan efektifitas*

Abstract: *The financial performance of the local government of Sorong city is important information in making a positive and transparent regional financial management policy, towards the welfare of the community. One tool to analyze the financial performance of local government in managing state finances is by conducting financial ratio analysis. This study aims to the ability of the financial performance of the local government of Sorong city, using a qualitative descriptive method to measure financial performance with a ratio of efficiency and effectiveness. Based on the results of the study showed that the efficiency ratio of the local government of Sorong city was less efficient because the value of the ratio was 90% - 99%, while the effectiveness ratio was quite effective because the value obtained was still below 100%. In order for Sorong City regional spending to be more efficient, the regional government in this case needs to study between the productive sector and the less productive sector, then the regional government must cut the budget in the less productive sector and divert it to a more productive sector. In order for expenditure to be effective and efficient, an important thing that must be known by public managers is an understanding the concept of spending, planning and controlling regional expenditure becomes easier to do. In order to plan as much as possible rationalize spending so that expenditure incurred can be effective and efficient.*

Keywords : *analysis of financial performance, local government financial performance, efficiency and effectiveness*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Akuntansi merupakan suatu sistem untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakainya dalam pengambilan keputusan. Keterampilan matematis sekarang ini telah berperan dalam menganalisis permasalahan keuangan yang kompleks. Begitu pula dengan kemajuan dalam teknologi komputer akuntansi yang memungkinkan informasi dapat tersedia dengan cepat. Tetapi seberapa canggih pun prosedur akuntansi yang ada, informasi yang dapat disediakan pada dasarnya bukanlah merupakan tujuan akhir. Tujuan informasi tersebut adalah memberikan petunjuk untuk memilih tindakan yang paling baik untuk mengalokasikan sumber daya yang langka pada aktivitas bisnis dan ekonomi. Namun pemilihan dan penetapan keputusan tersebut melibatkan berbagai aspek termasuk perilaku dari para pengambil keputusan. Dengan demikian akuntansi tidak dapat dilepaskan dari aspek perilaku manusia serta kebutuhan organisasi akan informasi akuntansi.

Dalam ruang lingkup Pemerintahan, informasi akuntansi sangat penting, salah satu contohnya adalah laporan keuangan pemerintah. Dalam hal ini laporan keuangan merupakan komponen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pada instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan. Fungsi informasi dalam laporan keuangan tidak akan memiliki manfaat jika penyajian dan penyampaian informasi keuangan tersebut tidak andal dan tidak tepat waktu.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Sorong.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Suardjono (2014 : 6) mengatakan akuntansi adalah kegiatan atau fungsi penyediaan jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif tentang unit-unit usaha ekonomik ,terutama yang bersifat keuangan,yang diperkirakan bermanfaat dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomik.

Soemarso (2014) mendefinikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi,mengukur dan melapor informasi ekonomi,untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Konsep Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah mempunyai dua pengertian, pengertian yang pertama mengacu pada kegiatan administrasi atau pengurusan keuangan daerah, sehingga akuntansi keuangan daerah lebih diartikan sebagai tata usaha keuangan atau tata buku. Pengertian yang kedua mengacu pada kegiatan penyediaan informasi dalam bentuk laporan keuangan bagi pihak eksternal dari Pemerintah Daerah. Pengertian kedua laporan keuangan inilah yang lebih mencerminkan definisi akuntansi karena ia tidak membatasi akuntansi hanya sebagai kegiatan administratif, namun menuntut adanya sistem yang bertujuan untuk menghasilkan informasi berupa laporan keuangan bagi pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonominya.

Jenis Standar Akuntansi Pemerintah

SAP berbasis akrual Mengakui pendapatan, beban aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual. Mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. (sesuai Pasal 4 ayat 1 PP 71 tahun 2010, Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual). SAP berbasis kas menuju akrual Mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.

Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila data tersebut diperbandingkan untuk

dua periode atau lebih, dan dianalisa lebih lanjut sehingga dapat diperoleh data yang akan dapat mendukung keputusan yang akan diambil.

Tujuan analisa laporan keuangan menurut Kasmir (2014) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik aset, kewajiban, ekuitas, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen kedepan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
6. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

Rasio Keuangan Daerah

Analisa rasio digunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel yang berbeda. Teknik analisa ini merupakan teknik yang paling populer dan digunakan secara luas dalam analisa keuangan. Pada dasarnya macam atau jumlah angka-angka rasio itu banyak sekali karena rasio dapat dibuat menurut kebutuhan penganalisa. Namun demikian, angka-angka rasio yang ada pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah berdasarkan sumber data keuangan yang merupakan unsur atau elemen dari angka rasio tersebut. Golongan pertama ini biasa disebut juga dengan *financial ratio* yaitu rasio-rasionya yang sumber datanya diambil dari neraca. Sedangkan apabila sumber datanya diambil dari laporan realisasi APBD maka disebut dengan *operating ratio*, dan apabila sumber datanya diambil dari neraca, laporan realisasi APBD, laporan arus kas maka disebut dengan *miscellaneous ratio*. Penggolongan yang kedua didasarkan pada tujuan dari penganalisa.

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas adalah sebagai berikut.

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}}$$

b. Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintah daerah (Ulum MD, 2012:31-32). Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi 2016 : 141)

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan}}$$

c. Rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikatakan efisien apabila rasionya kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi PAD maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

d. Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam mengalokasikan dananya terhadap belanja langsung atau belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja rutin lainnya. Angka rasio belanja langsung

terhadap total belanja di atas 50% menunjukkan kecenderungan realisasi anggaran pemerintah daerah lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat yang semakin baik, dan sebaliknya.

$$\text{Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja}}$$

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja}}$$

e. Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan

Rasio ini mengukur kontribusi dana perimbangan dalam pembiayaan pembangunan daerah. Semakin besar rasio yang dihasilkan maka pemerintah daerah semakin tergantung pada dana dari pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan di wilayahnya.

$$\text{Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan} = \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}}$$

f. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja

Rasio ini mengukur persentase jumlah realisasi belanja untuk kegiatan pembangunan fisik dibandingkan dengan seluruh realisasi belanja. Angka di atas 50% memperlihatkan kecenderungan realisasi belanja anggaran pemerintah daerah lebih banyak untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik.

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$$

Penelitian Terdahulu

Wonda (2016) dalam studinya Analisis Pemerintah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua. Hasil dari penelitian ini menunjuka rasio efektivitas baik.

Ramadani (2016) dalam studinya Analisis Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan PAD Kota Samarinda secara umum dikatakan cukup baik.

Kusumadewi dan Ilat (2016) dalam studinya Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2014. Hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dalam mengelola daerah mampu merealisasikan pendapatnya melebihi dari yang telah di anggarkan. Pemerintah harus dapat berusaha untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintahannya dalam mengelola pendapatan asli daerah dengan cara menggali potensi baru, dan perlu adanya mengoptimalkan kinerja belanjanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan fisik daerah, pembangunan jalan, irigasi, jaringan serta fasilitas umum masyarakat yang akan memberikan manfaat jangka panjang.

Poyoh, Srimurni dan Tulung (2017) dalam studinya Analisi Kinerja Pendapatan dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon. Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja badan keuangan daerah kota Tomohon dalam mengelola pendapatannya dikatakan belum baik hal ini dibuktikan dari varian pendapatan yang menunjukkan BKD belum mampu merealisasikan pendapatannya lebih dari yang dianggarkannya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Data merupakan keterangan – keterangan yang diperoleh dari penelitian atau melalui referensi – referensi untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Sorong.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode yang dilakukan dalam usaha mengumpulkan data dan informasi yaitu :

1. Penelitian lapangan (Field Researd Method). Dalam melakukan riset lapangan, penulis mengambil data-data langsung dari sumber data, sebagai pembanding untuk memproses keterangan dan kenyataan yang sebenarnya. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara :

- a. Pengamatan (Observasi), yaitu dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yang merupakan sumber data, sehingga data yang diperoleh benar-benar bersifat objektif.
 - b. Wawancara (Interview), yaitu dengan cara mewawancarai Kepala Badan dan pegawai yang ada guna mendapatkan data laporan keuangan yang benar dan jelas.
2. Penelitian kepustakaan (Litbang Researc Method). Dalam melakukan riset menggunakan data-data kepustakaan yaitu buku-buku cetak, dan jurnal-jurnal, guna menyempurnakan penelitian.

Metode Analisis Data

Tujuan dari setiap metode dan teknik analisa adalah untuk menyederhanakan data sehingga dapat lebih dimengerti. Pertama-tama penganalisa harus mengorganisir atau mengumpulkan data yang diperlukan, mengukur dan kemudian menganalisa dan menginterpretasikan sehingga data ini menjadi lebih berarti.

Penelitian ini menggunakan teknik analisa rasio untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kota Sorong yaitu :

a. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2007) Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan PAD. Dengan mengetahui perbandingan pengeluaran dan realisasi penerimaan daerah maka tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sorong di berikan penilaian dengan menggunakan kriteria penilaian berdasarkan Depdagri, Kepmendagri tahun 2002 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun sebagai berikut :

- Sangat efisien : <60%
- Efisien : 60% - 80%
- Cukup efisien : 80% - 90%
- Kurang efisien: 90% - 100%
- Tidak efisien : >100%

b. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektifitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektifitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut (Mahmudi, 2016: 141):

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Secara umum, kriteria penilaian berdasarkan Depdagri, Kepmendagri tahun 2002 nilai efektifitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Sangat efektif : >100%
- Efektif : 100%
- Cukup efektif : 90% - 99%
- Kurang efektif : 75% - 89%
- Tidak efektif : <75%

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kota Sorong

Nama Sorong berasal dari kata soren. Soren dalam bahasa Biak Numfor yang berarti laut yang dalam dan bergelombang. Kata Soren digunakan pertama kali oleh suku Biak Numfor yang berlayar pada zaman dahulu dengan perahu-perahu layar dari satu pulau ke pulau lain hingga tiba dan menetap di Kepulauan Raja Ampat. Suku Biak Numfor inilah yang memberi nama " Daratan Maladum" dengan sebutan SOREN yang kemudian dilafalkan oleh para pedagang Tionghoa, Misionaris clad Eropa, Maluku dan Sanger Talaud dengan sebutan Sorong.

Keuangan Daerah

Kota Sorong memiliki prospek dan peluang amat besar dalam memacu buhan ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan pengukuran atas nilai tambah yang dihasilkan akibat adanya berbagai ekonomi dalam suatu wilayah. Data Produk Domestik Regional Bruto tersebut menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Nilai Produk Domestik Regional Bruto Kota Sorong pada tahun 2002 sebesar 665,16 miliar rupiah. Jumlah tersebut menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2001 yang mencapai 560,1 miliar rupiah atau naik 20,03 %.

Dilihat dari peran sektor dalam pembentukan perekonomian Kota Sorong, sektor industri dan perdagangan, hotel dan restoran merupakan dua sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Sorong. Sektor industri menyumbangkan sekitar 24,95 % terhadap total Produk Domestik Regional Bruto dan 20,48 % disumbangkan oleh sektor perdagangan, hotel dan restaurant.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Sorong pada Tahun 2002 adalah 7,38 % dengan laju pertumbuhan tersebut Produk Domestik Regional Bruto perkapita Kota Sorong berturut-turut Rp. 3.350.276,03 dan Rp. 3.819.598,39 atau naik 14,01 %.

Pada tahun 2003 telah dilakukan kegiatan menerima penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sorong yang diterima sebesar Rp 57.054.864.430 atau Rp 30.951.825.430 (219 %) melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 26.103.039.000. Hal ini disebabkan program intensifikasi dan ekstensifikasi PAD berhasil. Sedangkan untuk Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) pada tahun 2003 mengalami peningkatan dari target awal yang ditentukan sampai dengan target perubahan mengalami kenaikan dengan prosentase pada masing-masing Retribusi yaitu Pajak daerah, Retribusi Daerah, Laba Badan Usaha Milik Daerah dan Pendapatan Lain-Lain sebesar 153,96 % atau jumlah keseluruhan sebesar Rp 15.246.377.711. Untuk total Penerimaan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan jenis penerimaan yaitu Pendapatan Asli daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak (BHP), Bagi Hasil Bukan Pajak (BHBP), dan ditambah dengan Pos Dana Perimbangan (DAU), Pos Dana Alokasi Khusus, Pos Dana Otonomi Khusus dan Bantuan Pemerintah Provinsi adalah sebesar Rp. 217.733.858.386 atau 150,93 %.

Hasil Penelitian

Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik, alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Namun demikian pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran. Efisiensi lebih menitikberatkan Pendapatan kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat. Efisiensi dapat dilihat dari dua sisi yaitu kemampuan organisasi untuk menggunakan sejumlah sumber daya tertentu untuk mendapatkan hasil yang lebih besar.

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima, semakin kecil rasio ini maka semakin efisien, begitu juga sebaliknya, dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan. Pendapatan sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan baik dengan pengorbanan seminimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil dengan biaya yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan.

Tabel 1. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja (RP)	Realisasi Pendapatan (RP)	REKD (%)	Kriteria
2014	672.960.863.401	678.488.076.193	98,18	Kurang Efisien
2015	876.626.500.966	899.152.955.866	97,49	Kurang Efisien
2016	929.713.979.980	1.037.498.574.726	89,61	Cukup Efisien
2017	1.087.436.304.582	1.204.927.489.606	90,24	Kurang Efisien
2018	1.283.771.876.534	1.330.515.594.943	96,48	Kurang Efisien

Sumber Data : Pemerintah Kabupaten Sorong, 2019

Menurut Halim (2007) Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima., yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan PAD. Secara umum, nilai efisiensi PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Sangat efisien : <60%
- Efisien : 60% - 80%
- Cukup efisien : 80% - 90%
- Kurang efisien: 90% - 100%
- Tidak efisien : >100%

Berdasarkan perhitungan Pendapatan pada tabel 1, di efisiensi keuangan

Pemerintah Kota Sorong, Pendapatan tahun 2016 tergolong Cukup efisien karena interval efisiensinya diantara 80%-90%. Hal itu terjadi karena realisasi pendapatannya lebih besar dari Pendapatan realisasi belanja daerah. Tahun 2014, 2015, 2017 dan 2018 tergolong kurang efisien karena nilai rasionya sudah 90% - 100%.. Hal ini diakibatkan terjadinya selisih yang cukup besar antara pendapatan dengan belanja.

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintah daerah (Ulum MD, 2012:31-32). Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi 2016 : 141).

Tabel 2. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Tahun Anggaran	Anggaran Pendapatan (RP)	Realisasi Pendapatan (RP)	Efektivitas	Kriteria
2014	719.330.805.964	678.488.076.193	94,32	Cukup Efektiv
2015	931.667.619.397	876.626.500.966	94,09	Cukup Efektiv
2016	1.020.356.810.944	929.713.979.980	91,11	Cukup Efektiv
2017	1.286.788.237.248	1.087.436.304.582	84,50	Kurang Efisien
2018	1.556.843.767.527	1.283.771.876.534	82,45	Kurang Efisien

Sumber Data : Pemerintah Kota Diolah 2019

Rasio efektifitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut (Mahmudi, 2016: 141):

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Secara umum, nilai efektifitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Sangat efektif : >100%
- Efektif : 100%
- Cukup efektif : 90% - 99%
- Kurang efektif: 75% - 89%
- Tidak efektif : <75%

Hasil perhitungan pada tabel 2, dapat diketahui bahwa Efektivitas Keuangan Pemerintah Kota Sorong Pendapatan tahun 2014 sampai dengan 2016 Cukup efektif, karena nilai yang diperoleh masih di bawah 100% yaitu 94.32%, 94.09%, 91.11%, 84,50% dan 82.45%.

Pembahasan

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Hasil perhitungan pada tabel 1, diketahui realisasi total belanja daerah Kota Sorong dari tahun 2014 sampai dengan 2018 rata-rata mengalami kenaikan. Tahun 2014 belanja daerah Kota Sorong sebesar Rp. 672.960.863.401, naik menjadi Rp. 876.626.500.966 ditahun 2015. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada

tahun 2016 menjadi Rp. 929.713.979.980. Dan tahun 2017 terjadi kenaikan belanja daerah menjadi Rp. 1.087.436.304.582, dan total belanja tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi Rp. 1.283.771.876.534.

Total pendapatan daerah Kota Sorong dari tahun 2014 sampai dengan 2018 selalu mengalami kenaikan. Berawal dari tahun 2014 total pendapatan daerah sebesar Rp. 678.488.076.193. Mengalami kenaikan menjadi Rp. 899.152.955.866 di tahun 2015. Pendapatan tahun 2016 total pendapatan daerah sebesar Rp. 1.037.498.574.726, kemudian tahun berikutnya tahun 2017 menjadi Rp. 1.204.927.489.606. Pendapatan tahun 2018 juga mengalami kenaikan menjadi Rp. 1.330.515.594.943.

perhitungan Pendapatan tabel 1, juga diketahui bahwa rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kota Sorong tahun 2014, 2015, 2017 dan 2018 dapat dikatakan Kurang Efisien. Pendapatan tahun 2014 rasio efisiensinya sebesar 99,18%, kemudian tahun 2015 menjadi 97,49%, tahun 2016 sebesar 89,61%, tahun 2017 sebesar 90,24%, dan tahun 2018 sebesar 96,48%.

Rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kota Sorong yang tergolong masih Kurang Efisien karena rata-rata rasionya 91,19% diakibatkan karena besarnya belanja daerah yang dikeluarkan terutama Pendapatan tahun 2015 dan 2018. Meskipun Pendapatan tahun 2015 dan 2018 tersebut Pemerintah Kota Sorong sudah dapat menekan belanjanya dari pendapatan yang dianggarkan sebelumnya namun jumlah pendapatan yang diperolehnya masih sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan belanja daerahnya. Sehingga dapat dikatakan kinerja Pemerintah Kota Sorong dalam hal ini masih buruk karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Untuk kedepannya diharapkan Pemerintah Kota Sorong dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya. Sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Mustafa (2008) dalam studi Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dimana nilai rasio berkisar antara 11,48% sampai 99,98% dengan rata-rata sebesar 65,65% yang berarti efisien. Ini menunjukkan bahwa Dispenda Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan seluruh kegiatan dalam tahun anggaran 2007 secara efisien namun penelitian ini sejalan dengan penelitian Paat (2013) dalam studi perbandingan kinerja pengelolaan APBD antara pemerintah kota Tomohon dengan pemerintah kota Manado dimana nilai rasio untuk kota Manado untuk tahun 2010 adalah 102,11% dan tahun 2011 adalah 97,49% dengan rata-rata 99,80% yang berarti kota Manado kurang efisien dalam mengelola keuangan daerahnya

Rasio Efektivitas Pendapatan

Hasil perhitungan pada tabel 2, menunjukkan bahwa anggaran Pendapatan Kota Sorong selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 719.330.805.964. Pada tahun 2015 anggaran dinaikan menjadi Rp 931.667.619.397. Pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp 1.020.356.810.944. Kemudian Pada tahun 2017 anggaran dinaikan menjadi Rp.1.286.788.237.248. Tahun 2018 anggaran kembali naik menjadi Rp. 1.556.843.767.527.

Realisasi Pendapatan Kota Sorong dari tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami kenaikan. Realisasi Pendapatan tahun 2014 sebesar Rp 678.488.076.193 atau sebesar 94,32% dari total pendapatan. Mengalami kenaikan Pendapatan tahun 2015 yaitu menjadi Rp 876.626.500.966 atau sebesar 94,09% dari total pendapatan. Pendapatan tahun 2016 Kota Sorong mengalami kenaikan menjadi Rp 929.713.979.980 atau sebesar 91,11% dari total pendapatan. Pendapatan tahun 2017 mengalami kenaikan yaitu menjadi Rp 1.087.436.304.582 atau sebesar 84,50% dari total pendapatan. Kemudian Pendapatan tahun 2018 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 1.283.771.876.534 atau 82,45% dari total pendapatan.

perhitungan pada tabel 2, dapat diketahui bahwa Efektivitas Pendapatan Keuangan Pemerintah Kota Sorong Pendapatan tahun 2014 sebesar 94,32%, tahun 2015 sebesar 94,09%, tahun 2016 sebesar 91,11%, tahun 2017 sebesar 84,50%, dan tahun 2018 sebesar 82,45. Efektivitas kinerja keuangan Kota Sorong untuk tahun 2014 sampai dengan 2018 berjalan cukup efektif karena efektivitasnya masih dibawah 90% - 99%.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Wonda (2016) yang melakukan penelitian di Kabupaten Nabire dijelaskan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua jika dilihat dari rasio efektivitas baik.

Menurut uraian dan hasil perhitungan pada tabel 2, Efektivitas Kinerja Keuangan Kota Sorong cukup Efektif karena rata-rata efektivitasnya di bawah 90% - 99% Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kota Sorong juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan Pendapatan yang telah direncanakan.

Namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan Pendapatan. Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang

memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan Pendapatan, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil dari analisis anggaran pendapatan belanja daerah dengan realisasinya pada Pemerintah Kota Sorong tahun anggaran 2014 – 2018 dengan menggunakan analisis kinerja keuangan, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pendapatan Pemerintah Kota Sorong secara umum dapat dikatakan kurang baik dan kinerja belanja pada Pemerintah Kota Sorong dilihat dari analisis kinerja keuangan secara umum juga dapat dikatakan kurang baik.
2. Hasil dari analisis kinerja pengelolaan APBD pada pendapatan dan belanja Pemerintah Kota Sorong pada tahun anggaran 2014 – 2018 dengan menggunakan analisis rasio keuangan yaitu rasio efektivitas dan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja maka dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan rasio efektivitas anggaran pendapatan pada tahun 2014 – 2018 bahwa kinerja Pemerintah Kota Sorong dinilai cukup efektif. Sedangkan hasil perhitungan efisiensi anggaran pendapatan, pada tahun 2014 – 2018 Pemerintah Kota Sorong juga dinilai kurang efisien dalam pengelolaan anggaran belanja. Hal ini berdampak kurang baik bagi instansi karena dapat mengakibatkan pemborosan dalam menggunakan anggaran belanja.

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan dan pembahasan di atas, maka saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah daerah Kota Sorong adalah sebagai berikut:

1. Agar belanja daerah Kota Sorong bisa lebih efisien, maka Pemerintah daerah dalam hal ini, perlu mengkaji antara sektor yang produktif dengan sektor yang kurang produktif, kemudian pemerintah daerah harus memotong anggaran di sektor yang kurang produktif dan mengalihkannya ke sektor yang lebih produktif.
2. Agar belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien, maka hal penting yang harus diketahui oleh manajer publik adalah pemahaman tentang konsep belanja, dengan memahami konsep belanja maka perencanaan dan pengendalian pengeluaran daerah menjadi lebih mudah dilakukan. Agar dalam perencanaan sebisa mungkin merasionalkan belanja sehingga belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien. Oleh karena itu formulasi kebijakan umum anggaran belanja daerah diarahkan pada program prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang didukung dengan pembangunan infrastruktur wilayah untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya di Kota Sorong.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim,A. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Yogyakarta.
- Kasmir. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Pertama, Cetakan Ketujuh. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Kusumadewi,W.N., dan Ilat,V. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara tahun 2012-2014. *Jurnal EMBA* Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal 634-644 ISSN: 2303-1174, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/11766/11359>, diakses pada tanggal 25 agustus 2019.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga Cetakan Pertama. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Mustafa,B. 2008. Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Terakreditasi SK Dirjen Dikti* No.43/Dikti/Kep/2008, Hal 792-802 ISSN: 1693-5241.

- [Http://www.jurnaljam.ub.ac.id/index.php/jam/article/viewFile/110/101](http://www.jurnaljam.ub.ac.id/index.php/jam/article/viewFile/110/101), diakses pada tanggal 1 maret 2018.
- Paat,S. 2013. Perbandingan Kinerja Pengelolaan APBD antara Pemerintah Kota Tomohon dengan Pemerintah Kota Manado. *Jurnal EMBA* Vol.1 No.3 September2013, Hal.851862 ISSN: 2303-1174. [Https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jam/article/viewFile/110/101](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jam/article/viewFile/110/101), diakses pada tanggal 25 agustus 2019.
- Poyoh,C.M., Sri Murni., dan Tulung,J.E. 2015. Analisis Pendapatan dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA* Vol.5 No.2 Juni 2017, Hal 745-752 ISSN 2303-1174. [Https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/15958/15474](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/15958/15474), diakses pada tanggal 25 agustus 2019
- Ramadani,R.F. 2016. Analisis kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda. *Journal Ekonomi* Vol.5 No.3 2016. [Https://media.neliti.com/media/publications/56181-ID-Analisis-kinerja-anggaran-dan-realisasi.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/56181-ID-Analisis-kinerja-anggaran-dan-realisasi.pdf), diakses pada tanggal 25 agustus 2019.
- Soemarso,S.R. 2014. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Salemba Empat, Jakarta.
- Suwardjono. 2014. *Teori Akuntansi (perekayasaan pelaporan keuangan)* Edisi Ketiga. BPFE, Jakarta.
- Ulum MD,I. 2012. *Audit Sektor Publik*. Edisi Pertama Cetakan Kedua. Bumi Aksara, Jakarta.
- Wonda,W. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua. *Jurnal EMBA* Vol.4 No.3 September 2016, Hal.192-200 ISSN: 2303-1174, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/13668/13252>, diakses pada tanggal 25 agustus 2019.

